

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM PALEMBANG PADA MASA KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM**

Priyayi di Kota Palembang dimulai pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Sejak era masa Kesultanan Palembang Darussalam, penduduk asli orang Palembang terdiri dari dua golongan, yaitu kelompok *priyayi* dan rakyat biasa. Priyayi merupakan sekelompok orang yang mempunyai kedudukan terhormat di tengah masyarakat, dalam hal karena mereka keturunan sultan atau kaum ningrat (garis keturunan) maupun orang yang berkedudukan karena diangkat oleh sultan. Priyayi ini terdiri dari tiga tingkatan, yakni: pangeran, raden, dan masagus. Untuk golongan rakyat, kelompok ini dilihat dari strata sosial-budaya yang terdiri dari empat kelompok yaitu orang miji, orang senai, orang yang menggadaikan diri, dan budak.<sup>1</sup>

Kehidupan kaum priyayi di Kota Palembang semakin beragam dikarenakan termasuk golongan bangsawan atau golongan ningrat, baik itu dari tempat tinggal pemukiman atau geografis, struktur pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai kondisi umum Palembang masa Kesultanan Palembang Darussalam yang dibahas oleh peneliti yang meliputi.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Karesidean Palembang 1925-1942*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hal. 54.

## A. Kondisi Geografis

Daerah wilayah Kesultanan Palembang meliputi daerah Batanghari Sembilan dan juga daerah yang disebut Negeri Luar. Daerah yang disebut dengan Batanghari Sembilan ini meliputi daerah sembilan sungai utama di kawasan tersebut yang bermuara di Sungai Musi. Sembilan sungai utama ini yang dimaksud adalah Sungai Banyuasin, Kikim, Kelingi, Lakitan, Lintang, Rawas, Lematang, Ogan, dan Komering. Selain itu, wilayah Negeri Luar secara khusus merujuk kepada Pulau Bangka dan Belitung.<sup>2</sup> Wilayah Kesultanan Palembang meliputi dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah ini mengalir melalui sungai besar dan kecil, rawa dan lautan/selat. Situasi inilah yang membuat hasil perikanan Kesultanan Palembang melimpah.<sup>3</sup>

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam terbagi menjadi empat kawasan. Kawasan pertama ialah ibukota dan istana atau keraton sebagai pusat kesultanan. Sementara di luar ibukota kesultanan adanya tiga kawasan yang berbeda-beda, yaitu daerah *sikap*, daerah *kepungutan*, dan daerah *sindang*. Keraton sebagai tempat tinggal sultan merupakan pusat pemerintahan ibukota. Selain itu, daerah di luar ibukota membentuk struktur pemerintahan dengan pola yang berbeda. Jika di sederhanakan dapat dibedakan antara pemerintahan untuk wilayah uluan dan wilayah *iliran*. Pusat wilayah Kesultanan Palembang Darussalam yang berpusat di kawasan *iliran* dan

---

<sup>2</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, (Jember: Penerbit Tarutama Nusantara, 2016), hal. 49.

<sup>3</sup> Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 29.

penduduknya adalah kawula istana. Sedangkan wilayah *uluang* dan di kawasan ini orang-orang asing non-kawula bermukim.

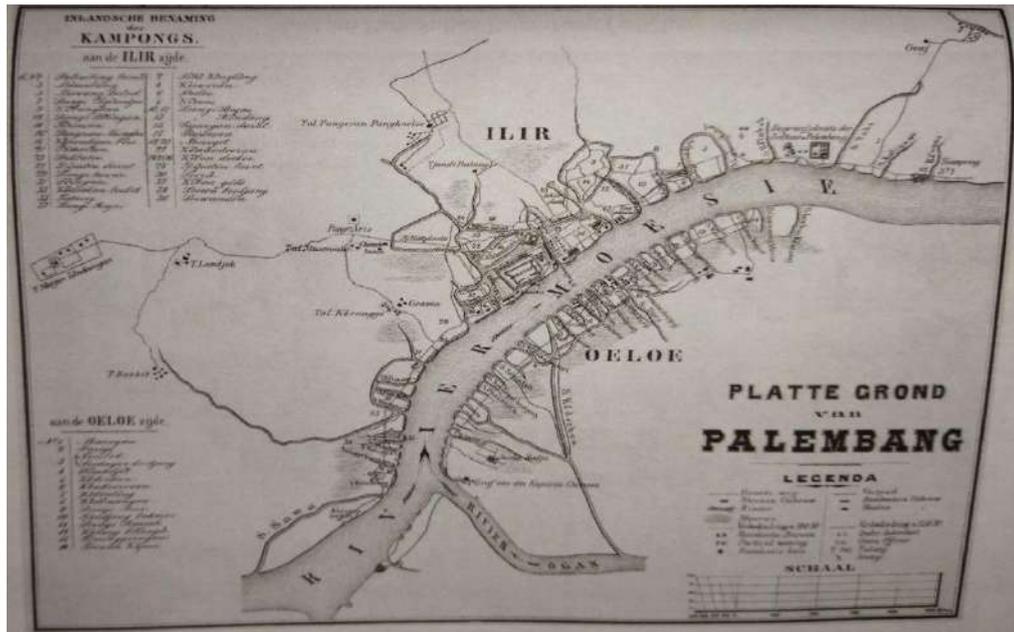
Ibukota Kesultanan Palembang Darussalam berpusat di tepian Sungai Musi, sekitar 15 mil dari muara Sungsang dan satu mil dari persimpangan Sungai Ogan dan Sungai Komering dengan Musi. Karena ketiga sungai tersebut merupakan akses masuk ke daerah pedalaman, ibukota Palembang memiliki wilayah yang sangat strategis dalam kaitannya dengan pengawasan lalu lintas antara daerah luar dan pedalaman Palembang.<sup>4</sup>

Sekitar abad ke-19, wilayah Palembang adalah 85.918 kilometer, dan sebagian wilayah Palembang tersebut merupakan dataran yang sangat subur, terpotong oleh banyak sungai. Terkhusus di timur daerah pesisir atau aliran sangat rendah, rawan banjir, dan sebagian besar berupa rawa-rawa, sedangkan di bagian barat pegunungan merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Di bagian Selatan dimulai dengan dataran tinggi Mekakau dan Ranau, yang terputus hanya pada sisi Barat oleh rangkaian gunung mencapai Pandan yang tingginya 1.678 meter, tetapi di sebelah Timur daerah pegunungan itu berubah menjadi dataran rendah yang luas. Di sisi selatan ada dataran tinggi Mekakau dan Ranau yang hanya terpotong di sisi barat oleh deretan pegunungan yang mencapai Pandan di ketinggian 1.678 meter, namun menjadi dataran rendah yang luas di pegunungan timur. Di bagian selatan dataran tinggi terdapat Danau Ranau yang tempat Sungai Wai Kuala menyatu dengan Mekakau, lalu ke Saka di Muara Dua yang namanya berubah menjadi Ogan Komering. Selanjutnya Sungai Ogan Komering itu

---

<sup>4</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, hal. 50.

mengalir ke arah Timur dan bertemu dengan Sungai Musi di Plaju, dekat wilayah Palembang.<sup>5</sup>



Gambar 1.1. Peta Palembang tahun 1877

Sumber: KITLV/Leiden University Library, Ref. D D 17,4.

Kota Palembang memiliki iklim tropis dengan suhu 32 derajat Celcius di musim kemarau dan 25 derajat Celcius di musim hujan. Oleh sebab itu, daerah tersebut dipengaruhi oleh angin barat dan timur sepanjang tahun. Angin barat sedang bertiup dan membawa cukup air untuk menyebabkan currah hujan dari

---

<sup>5</sup> Kgs. M. Hafiz, "Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), hal. 31-32.

Oktober dan membawa udara kering yang menyebabkan kemarau panjang di Sumatera Selatan.<sup>6</sup>

Di wilayah Palembang rata-rata curah hujan tahunan 2.663 mm, di Tebing Tinggi 3.131 mm, dan Sulurangun 3.103 mm, Lahat 3.422 mm, Bandar 2.996 mm, Baturaja 2.944 mm, Muara Bliti 2.953 mm, dan Muara Dua 2.496 mm. Musim kering adalah Juni di Sulurangun dengan curah hujan 135 mm, sedangkan Juli di Palembang, Tebing Tinggi, Lahat, Bandar, Baturaja, dan Muara Bliti masing-masing dengan curah hujan 105, 125, 123, 155, 126, dan 126 mm, dan September di Muara Dua dengan curah hujan 120 mm. Sementara itu, musim hujan jatuh pada Desember di Palembang, Surulangun, Baturaja, Muara Dua dan Muara Bliti masing-masing dengan curah hujan 438, 439, dan 337 mm. Oleh karena itu kondisi tanah di Palembang sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti sayur-mayur, buah-buahan dan tanaman yang populer di pasaran dunia seperti cengkeh, kopi dan lada.<sup>7</sup> Di sebelah Timur memiliki dataran rendah, sehingga wilayah itu membuat tanaman yang ditanam tumbuh menjadi subur. Wilayah Palembang memiliki curah hujan yang rata, musim hujan terjadi pada Desember dan musim kering pada Juli.

Wilayah Palembang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti timah, batubara, dan tambang minyak. Sistem tanam yang dilakukan masih sangat begitu sederhana, sebagian penduduk berada di dalam kehidupan daerah pedalaman yang ditentukan oleh tanah pertanian. Di wilayah Karesidenan Palembang di sebelah Timur. Di daerah itu terdapat sungai besar, yaitu Ogan,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>7</sup> J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*, terj. Sugarda Purbakawatja, (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 53-55.

Lakitan, Rawas, Komering, Sungai Musi merupakan induk Sungai Beliti, Kelingin, dan Batang Leko.<sup>8</sup> Kehidupan masyarakat Palembang tidak hanya ditentukan dengan pertanian, mereka juga memiliki sumber daya alam yang sangat kaya.

Kota Palembang memiliki sungai-sungai besar, salah satunya yaitu Sungai Musi. Sungai tersebut merupakan sungai terpanjang di Sumatera Selatan, panjangnya mencapai 700 km sedangkan luasnya mencapai 1.635.168 hektar. Sungai ini membelah wilayah Palembang menjadi dua bagian yaitu *ulu* dan *ilir*. Selain itu, sungai ini dapat dilayari dengan kapal yang berukuran besar dan dipinggiran sungainya digunakan sebagai pusat pertemuan para pedagang daerah pedalaman. Melalui kegiatan tersebut, Palembang menjadi ramai dan menjadi jalur lalu lintas yang menghubungkan pedalaman dengan pusat kerajaan yang juga menjadi pusat kegiatan perdagangan sehari-hari. Selain itu juga, Belanda dan Inggris mengadakan pertemuan di kota Palembang. Orang-orang Arab, Cina, dan India merupakan para pedagang yang ada di Palembang. Orang Arab membentuk pemukiman di pinggiran kota dan Eropa bertempat tinggal di pusat kota.<sup>9</sup>

## **B. Struktur Pemerintahan masa Kesultanan Palembang Darussalam**

Dalam menjalankan pemerintahan kesultanan, sultan merupakan penguasa tertinggi di Kesultanan Palembang Darussalam. Kekuatannya tidak dibatasi oleh aturan hukum. Putra mahkota adalah Pangeran Ratu, asisten sultan. Pangeran Ratu

---

<sup>8</sup> P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, terj. Soegarda Poerbakawatja, (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 16.

<sup>9</sup> Kgs. M. Hafiz, "Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), hal. 34.

adalah calon raja atau sultan, jika sultan tidak ada, dia akan menjadi wakil sultan dan dia akan menjadi penasihat sultan.<sup>10</sup> Sultan dibantu oleh pejabat-pejabat negara yang biasa disebut empat manca-negara, yakni Papatih (Pangeran Natadiraja), Pangeran Nata Agama, Tumenggung Karta, dan Pangeran Karta Negara (Pangeran Citra). Papatih membantu sultan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Papatih inilah yang mengawasi pengumpulan pendapatan kesultanan, menerima laporan semua urusan kerajaan, menyampaikan usulan terkait urusan pajak dan kerja wajib bagi sultan, menguasai alat-alat perlengkapan perang, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada sultan terkait kebijakan yang dibuatnya. Sultan juga dibantu oleh adipati atau putera mahkota, yang memainkan peran sebagai penasihat langsung, wakil, dan pengganti sultan manakala sultan sendiri berhalangan.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan urusan di bidang keagamaan, sultan dibantu oleh Pangeran Nata Agama (penghulu), yang bertindak sebagai kepala alim-alim ulama. Pangeran Nata Agama menangani perkawinan, perceraian, kematian, perwalian kelalaian dan berbagai urusan keagamaan lainnya. Sementara itu, Pangeran Karta Negara bertindak sebagai kepala *pengalasan* atau hulubalang sultan yang disertai tugas melakukan penjagaan keamanan ibu kota, serta menjalankan eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana.<sup>12</sup> Pangeran Karta Negara dibantu oleh pejabat yang bergelar *tanda*. *Tanda* dan aparatnya menangani pelaku, lalu menyerahkannya ke pengadilan untuk menegakkan putusan yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>11</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, hal. 50.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 50-51.

telah ditetapkan pengadilan. Pangeran Karta Negara dan aparatnya menyerahkan kepada sultan masalah besarr yang tidak bisa diurusinya.<sup>13</sup>

Dalam urusan keamanan, sultan dibantu oleh Tumenggung Karta, yang bertindak menangani masalah keamanan. Tumenggung Karta memiliki empat pegawai yang masing-masing bertanggungjawab atas ronggo (urusan kerajaan), tumenggung (urusan administrasi), *ngabehe/ingabehe* (bertugas sebagai mata-mata pemerintahan) dan *demang* (menangani masalah keamanan dan pengaduan masyarakat).<sup>14</sup>

Dalam urusan bidang perdagangan diserahkan kepada *syahbandar* untuk menangani masalah-masalah penting di bidang pelabuhan dan perdagangan. Syahbandar bertanggungjawab atas hal-hal penting di bidang perdagangan dan menangani perselisihan antar awak kapal. Syahbandar dibantu oleh tiga sampai empat karyawan. Asisten syahbandar bertanggungjawab atas sistem perdagangan (tiban-tukon) dan bea cukai (pajak cukai atas barang impor tetap (seperti garam, sutra, kain, benang emas dan perak).<sup>15</sup> Dalam menjalankan tugasnya Sultan Palembang dibantu oleh pejabat lainnya yang menangani urusan pemerintahan dan kewan, peradilan, agama dan perdagangan.

Selain keempat yang ada di atas, pembantu sultan lainnya adalah golongan pegawai yang dalam istilah setempat dinamakan *raban* atau *jenang*. Kedua istilah ini merujuk kepada orang-orang yang diberi hak penguasaan atas dusun atau

---

<sup>13</sup> Kgs. M. Hafiz, "Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), hal. 57.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>15</sup> Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, (Jakarta: Gramedia, 2017). hal. 19-21.

*marga* atas nama sultan. Dengan hak yang diperolehnya dari sultan tersebut, *raban* atau *jenang* adalah figur yang mempunyai otoritas untuk mengumpulkan berbagai hasil atau produk yang dihasilkan oleh *marga* atau *dusun* yang dikuasainya, menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di dalamnya. Dalam berbagai kasus yang rumit dan tidak ditemukan jalan penyelesaiannya, merekalah yang akan membawa persoalan tersebut kepada pepatih atau raja. Melalui *jenang* atau *raban* pulalah semua perintah raja disampaikan ke bawah kepada kepala-kepala *marga* atau *dusun* untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya sebagaimana yang dikehendaki raja atau sultan.<sup>16</sup>

Posisi *jenang* dan *raban* tidak bersifat permanen. Sewaktu-waktu mereka bisa diberhentikan dan diganti oleh sultan dengan orang lain menurut kemauannya. Dapat juga terjadi bahwa pada saat terjadi penobatan raja baru, para *jenang* dan *raban* yang sebelumnya mendapatkan tanah/daerah untuk diperintah atas nama sultan, mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada raja yang baru. Mereka kemudian menerima kembali tanah-tanah tersebut dari raja yang baru, baik dalam ukuran yang sama ataupun kadang-kadang dikurangi karena diberikan kepada orang lain. Akan tetapi, pada umumnya raja diharapkan bertindak tegas sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, yakni anak laki-laki akan menerima hak-haknya seperti yang telah didapatkan oleh orang tua mereka.<sup>17</sup>

Di pedalaman, pemerintahan dilaksanakan oleh *pasirah* yang bergelar *depati*. *Depati* yaitu kepala *marga*. Di *uluan*, mereka bebas melaksanakan pemerintahannya sendiri. Pembantu *depati* disebut *proatin* atau anak buah, *kria*,

---

<sup>16</sup>Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, hal. 51.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 51-52.

dan *beginda*. Mereka bertugas menjalankan peradilan, pemerintahan, dan menjaga tradisi. *Depati* yang sudah lama bekerja mendapat gelar *pangeran*. Pemberian gelar tersebut dipertimbangkan karena mereka dipersiapkan untuk ikut dalam peperangan.<sup>18</sup>

Daerah *kepungutan* juga dikenal sebagai wilayah *iliran*. Karakteristik utama yang tampak di kawasan ini adalah berlakunya kekuasaan sultan dan pejabat istana untuk melakukan pungutan pajak maupun layanan tenaga kerja. Mereka juga memegang hak istimewa untuk melakukan penguasaan secara eksklusif atas barang-barang tertentu yang ada dalam monopoli mereka. Di kawasan *iliran* masyarakat mempunyai orientasi yang kuat pada kegiatan di sektor perdagangan, bahkan beberapa penulis Barat khususnya Van Gravenhage dan Van Rijn van Alkemade menggambarkan bahwa penduduk di kawasan ini “dilahirkan dengan bakat dagang”. Masyarakat di kawasan ini telah terintegrasi begitu erat dengan kegiatan-kegiatan dalam dunia perdagangan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan hal ini tidak terlepas dari peranan Sungai Musi sebagai lalu lintas perdagangan yang ramai.<sup>19</sup>

Daerah *sindang* yang berarti perbatasan adalah kawasan yang biasa disebut masyarakat setempat sebagai kawasan *uluan*. Wilayah *sindang* meliputi Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dan Kisam, sedangkan daerah yang terletak antara Lampung dan Palembang *iliran* termasuk kelompok *sindang merdeka*. Wilayah ini dikuasai oleh para pemimpin lokal yaitu *pasirah* dan bergelar *depati*.

---

<sup>18</sup> Kgs. M. Hafiz, “Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), hal. 59.

<sup>19</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, hal. 52.

Para *depati* bertindak sebagai kepala-kepala kelompok masyarakat kesukuan yang otonom. *Depati* bukan berposisi sebagai bawahan sultan. Kekuasaan sultan dalam bentuk pemberlakuan hak-hak untuk melakukan pungutan dan kerja wajib bagi istana secara langsung pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah *sindang* secara praktis tidak berlaku. Masyarakat *sindang* diatur dengan perangkat hukum tersendiri, yang dinamakan Undang-Undang Sindang Merdeka. Dalam menggerakkan roda pemerintahannya di wilayah *sindang*, para *depati* dibantu oleh beberapa *proatin*, *beginda*, dan *kria*.<sup>20</sup>

*Kria* dan *pembarap* sebagai kepala dusun. Mereka disebut *pembarap* kalau dusun tersebut menjadi pusat pemerintahan *marga*, *kria*, *beginda*, *lurah* atau *ingabehi/ngabehi* secara bersama-sama disebut *proatin* atau *anak beras* dengan pakaian kehormatan berupa kopiah dari rotan yang telah dijahit dengan beang perak atau emas. Menjaga keamanan dan hukum, dan memelihara kebiasaan lama adalah tugas utama mereka. *Proatin* dan asistennya menangani masalah-masalah kecil seperti penipuan, pencurian, dan pelanggaran adat di tingkat desa kecil. Hukumannya berupa denda ringgit, dengan maksimal dua belas *real* Spanyol atau benda/binatang. *Proatin* dan *depati* diuntungkan dari denda tersebut. Masalah yang lebih besar, seperti pembunuhan atau pemberontakan, ditangani oleh *depati* bersama dengan *proatin* di *bale-bale marga*. Jika kasusnya tidak bisa diselesaikan di tingkat *marga*, permasalahannya diserahkan ke pusat pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 52-53.

<sup>21</sup> Kgs. M. Hafiz, "Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), hal. 59-60.

Penanggung jawab urusan agama diserahkan kepada atas *lebai penghulu* ditingkat *marga* dan *khatib* di desa kecil, *kaum* menjadi tingkat paling bawah yaitu kampung. Masalah yang berkaitan dengan agama Islam terus diurus oleh pejabat, seperti perceraian, perkawinan, rujuk, talak, fitrah, zakat dan kematian. *Lebai penghulu* bertugas mengajar mengaji. *Kaum* memiliki tugas memelihara langgar, masjid, tempat-tempat keramat, padasan, memandikan mayat, dan menulis. *Kaum* melaksanakan tugasnya secara sukarela. Di setiap desa ada *panagawe*, masyarakat yang menjalankan tugas sehari-hari. *Panagawe* dibagi menjadi empat wilayah, yaitu *natakirti*, *natakusuma*, *martonogoro*, dan *wangsaguna*. *Natakirti* bertanggung jawab menerima dan melayani tamu dari desa lain, *natakusuma* bertanggung jawab untuk urusan penanaman, dan *martonogoro* membantu *depati* dan *wangsaguna* menangani masalah keamanan dan ketertiban. *Panagawe* memiliki posisi strategis yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagian masyarakat.<sup>22</sup>

Jika *beginda* atau *kria* meninggal, *panagawe* bertemu dengan *matagawe* bersidang, dan mereka memilih orang untuk menjadi kepala desa, anak atau kerabat dekat kepala desa akan diangkat sebagai kepala desa kecil yang baru. Pengangkatan ini akan diberitakan kepada *depati*, kemudian diumumkan kepada seluruh anggota masyarakat.<sup>23</sup> Di *Uluan* memiliki wakil pemerintah antara lain *jenang* dan *raban*. Pemerintahan di daerah pedalaman dilaksanakan oleh *pesirah* bergelar *depati*. Kepala dusun disebut *pembarap* dan *kria*. Di tingkat *marga*,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>23</sup> Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 21-22.

kepala urusan agama dijabat oleh *lebai penghulu*, *khatib* di tingkat dusun, dan *kaum* di tingkat yang paling rendah yaitu kampung.<sup>24</sup>

Di *Uluan* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *alingan* dan *matagawe*. Pengelompokan ini sudah ada sejak zaman Sultan Abdul Rahman (Cinde Balang). *Alingan* adalah pekerja yang dilindungi. Tugas mereka adalah membantu menyelesaikan tugas *matagawe*. *Alingan* adalah bagian dari orang *matagawe*. *Matagawe* adalah orang yang tinggal di desa dan marga yang diwajibkan membayar pajak. Jumlah mereka tidak tetap, tetapi mereka biasanya mencapai sekitar 10% dari total penduduk. Jika *matagawe* meninggal, posisinya akan digantikan oleh putra *matagawe*. Kecuali tidak memiliki anak laki-laki, akan memilih *matagawe* lainnya.<sup>25</sup>

Selain dari dua daerah yang disebutkan di atas, ada pula kesatuan daerah yang dinamakan *Sikap*. Pembentukan *sikap* adalah untuk memenuhi kebutuhan istana. *Sikap* adalah desa yang sebagian masyarakat mendapat tugas dari istana. Di beberapa titik, mereka bekerja untuk kepentingan istana, seperti mempersiapkan pendayung istana, mengangkut hasil panen, membangun rumah untuk Sultan, dan bekerja di ladang. Sebagian dari pendapatan bebas pajak. Misalnya, orang Blida atau Musi Ilir bekerja di istana untuk mengambil air. Pada 1818-1819, ada 500 hingga 600 orang. Daerah lain dalam kelompok *Sikap* yaitu Sunsang, Sukarami atau Musi Ulu dan daerah dengan sungai besar. Mereka memiliki tanggung jawab sebagai pendayung perahu Sultan. Lalu, ada beberapa

---

<sup>24</sup> Kgs. M. Hafiz, "Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), hal. 61.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 61.

*miji* atau orang yang mengorbankan tenaganya untuk Sultan.<sup>26</sup> Masyarakat *uluan* dibagi dua kelompok yaitu *alingan* dan *matagawe*. Wilayah Sultan terbagi menjadi dua bagian, yaitu *sindang* dan *kepungutan*.



Gambar 1.2. Benteng Toboali (Bangka), dilihat dari darat (1859), cat air, J.J Geelhoed, Sumber : KITLV Leiden University, Ref. 37A113.

Bangka-Belitung yang menjadi bagian dari Kesultanan Palembang, Sultan memilih wakilnya sebagai penguasa wilayah, dengan gelar *batin* atau *depati*. Mereka berasal dari kalangan bangsawan masyarakat sekitar atau ibu kota Palembang. Tugas *batin* atau *depati* adalah menjalankan pemerintahan daerah atas nama Sultan Palembang, dan *teko/tiko* menangani penambangan timah. *Teko* adalah seorang pegawai di Palembang, ibu kota, yang menangani masalah penambangan timah. *Teko* memberikan wewenang terhadap *kongsi*. Tugas *kongsi* adalah melakukan pembukuan dan mengirimkan laporan kependudukan di Pulau

---

<sup>26</sup> Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 24-26.

Bangka. *Kongs* terkait langsung dengan karyawan pertambangan timah di Pulau Bangka. *Teko* adalah Wakil Sultan, bertanggung jawab atas semua penambangan timah di pusat ibu kota. *Teko* terkadang mengunjungi tambang timah di Pulau Bangka.<sup>27</sup>

### C. Pendidikan

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam juga terjadi perkembangan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa inilah sebenarnya kemunculan sebuah tradisi keilmuan Islam yang khas di Sumatera Selatan dimulai. Kemunculan tradisi keilmuan Islam ini dipelopori oleh para ulama dan didukung sepenuhnya oleh para Sultan Palembang Darussalam sejak akhir abad ke-17 dan awal abad ke-19. Oleh karena itu, tradisi keilmuan di wilayah ini dimulai dari istana. Istana atau keraton Kesultanan Palembang Darussalam adalah pusat pengkajian Islam dan sastra di Palembang.<sup>28</sup> Bahkan, pada masa ini, Palembang menjadi pusat perkembangan keilmuan Islam dan sastra Melayu di Nusantara pasca kemunduran Kerajaan Aceh yang menjadi pusat studi Islam dan sastra Melayu pada periode sebelumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Kgs. M. Hafiz, "Perekonomian Palembang Masa Kesultanan Sampai Masa Kolonial Belanda (1136 H-1360 H/1724 M-1942 M)", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), hal. 62.

<sup>28</sup> Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hal. 92.

<sup>29</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 65-66.



Gambar 1.3. Masjid Agung Palembang (sekitar tahun 1830)

Sumber : KITLV/Leiden University Library, Ref. 37C127

Munculnya istana sebagai pusat studi Islam dan sastra Melayu terutama disebabkan adanya kolaborasi antara para Sultan Palembang, yang menunjukkan perhatian besar pada perkembangan ilmu agama dan sastra, dengan beberapa ulama Palembang yang cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu-ilmu Islam dan sastra Melayu. Para Sultan Palembang ini, sejak Sultan pertama hingga Sultan terakhir, Sultan Mahmud Badaruddin II (....-1823 M), mempunyai hubungan dekat dengan para ulama dan sebagian dari mereka mensponsori para ulama istana dan penulis Palembang untuk melakukan penulisan karya-karya keagamaan Islam. Dari tangan para ulama dan penulis ini telah lahir lebih dari seratus kitab dalam berbagai bidang

keilmuan tradisional Islam (Tauhid, Tasawuf, Fikih, Tarikh dan Ilmu Alquran), sastra Melayu, dan sejarah.<sup>30</sup>

Pada masa tiga Sultan Palembang, yakni Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago (1706-1714 M), Sultan Agung Qamaruddin Sri Truno (1714-1724 M), dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-175 M), muncul seorang ulama terkenal yang bernama Faqih Jalaluddin yang mengajarkan ilmu Alquran dan Ushuluddin serta giat dalam berdakwah sampai ia wafat pada tahun 1784 M.<sup>31</sup> Di masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo juga muncul ulama yang bernama Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. Ulama lainnya adalah Kemas Fakhrudin pada masa Sultan Ahmad Najamuddin I (1757-1774 M), ‘Abdu al-Samad al-Palimbani di masa Sultan Muhammad Bahauddin (1774-1804 M), dan sebagainya.<sup>32</sup> Ketiga ulama yang disebut terakhir ini dikenal sebagai ulama yang cukup produktif dalam menulis kitab-kitab dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, terdapat nama-nama lain ulama Palembang yang juga menghasilkan karya-karya intelektual Islam, yakni Muhammad Muhyiddin bin Syekh Syihabuddin, Kemas Muhammad bin Ahmad, Sultan Mahmud Badaruddin II, Pangeran Panembahan Bupati saudara Sultan Mahmud Badaruddin II, Muhammad Makruf bin Abdullah Khatib Palembang, Ahmad bin Abdullah, Kyai Ranga Setyanandita Ahmad, Pangeran Tumenggung Karta Menggala, Demang

---

<sup>30</sup> Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Karesidean Palembang 1925-1942*, hal. 32-33.

<sup>31</sup>Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1999), hal. 4.

<sup>32</sup> Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 92-93.

Muhiddin.<sup>33</sup> Satu orang lagi yang juga harus disebut, kata van Ronkel, seperti dikutip Rahim, adalah Kemas Hasanuddin.<sup>34</sup>

Dengan melihat karya-karya intelektual yang dihasilkan para penulis dan ulama Palembang, Rahim mengategorikan mereka ke dalam tiga kelompok.<sup>35</sup> *Pertama*, para penulis karya-karya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu Tauhid/Kalam, Tasawuf, Tarekat, Tarikh dan Alquran. Di antaranya adalah Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad yang menulis *Kitab Risalah*, *'Aqidat al-Bayan*, dan menerjemahkan serta memberi syarah *Kitab Jawaharat al-Tawhid* karya Ibrahim Laqqani; Kemas Fakhrudin yang antara lain menulis *Kitab Mukhtasar* dan *Futuh al-Sha'am*; Abdu Shamad Al-Palimbani yang antara lain menulis *Zuhrat al-Murid fi Bayan Kalimat at-Tawhid*, *Hidayat al-Salikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin*, dan *Zad al-Muttaqin fi Tawhid Rabb al-Alamin*.<sup>36</sup>

*Kedua*, para penulis dalam bidang sastra. Di antaranya adalah Sultan Mahmud Badaruddin II yang menulis *Syair Sinyor Kosta*, *Hikayat Marrtalaya*, *Syair Nuri*, dan *Pantun*; Pangeran Panembahan Bupati yang menulis *Syair Raja Mambang Jawhari*, *Syair Kembang Air Mawar*, dan *Syair Patut Delapan*; dan Ahmad bin Abdullah yang menulis *Hikayat Andaken Penurat*.<sup>37</sup>

*Ketiga*, para penulis dalam bidang sejarah, yakni Pangeran Tumenggung Karta Menggala, yang menulis *Cerita Negeri Palembang*, *Carita daripada*

---

<sup>33</sup> G.W.J. Drewes, *Directions for Travellers on the Mystic Path*, (Nijhoff: The Hague, 1977), hal. 219.

<sup>34</sup> Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 93.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 93-95.

<sup>36</sup> M. Chatib Quzwain, *Mengenang Allah: Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syaikh 'Abdus-Samad Al-Palimbani*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 22-31.

<sup>37</sup> Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Karesidean Palembang 1925-1942*, hal. 34.

*Aturan Raja-Raja di Dalam Negeri Palembang*, dan *Hikayat Mahmud Badaruddin*; dan Demang Muhyiddin, seorang hakim pengadilan Palembang, yang menulis *Silasila Raja-Raja di dalam Negeri Palembang*.<sup>38</sup>

Karena pusat pengembangan ilmu agama Islam dan sastra Melayu adalah istana dan bukan lembaga pendidikan tradisional di tengah masyarakat yang terpisah dari istana, maka sampai dengan runtuhnya Kesultanan Palembang perkembangan ilmu-ilmu Islam belum banyak menyentuh masyarakat umum baik di Kota Palembang maupun di wilayah pedesaan dan pedalaman di Sumatera Selatan. Hal ini berbeda dengan di Jawa di mana pesantrenlah yang dijadikan pusat pengembangan dan pemeliharaan ilmu-ilmu agama Islam.<sup>39</sup> Konsekuensi logis keadaan seperti di Jawa ini adalah bahwa ilmu agama Islam lebih mungkin untuk tersosialisasi dan menyentuh kehidupan masyarakat kebanyakan.<sup>40</sup>

Dijadikannya keraton/istana sebagai pusat studi Islam dan sastra Melayu di Palembang, merupakan ciri utama perkembangan Islam yang membedakan wilayah ini dengan perkembangan Islam di Barat dan Timur Tengah. Penguasa Muslim di Barat dan Timur Tengah membentuk lembaga pendidikan tersendiri di luar istana guna mengembangkan ilmu-ilmu keislaman.<sup>41</sup> Kenyataan ini pula yang agaknya menjadi salah satu sebab keraton Kesultanan Palembang tidak banyak berperan dalam Islamisasi masyarakat Sumatera Selatan.<sup>42</sup> Dengan kata lain,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>39</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, hal. 186.

<sup>40</sup> Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Karesidean Palembang 1925-1942*, hal. 35.

<sup>41</sup> Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 197.

<sup>42</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 210-211.

tradisi keilmuan Islam yang berkembang pada masa Kesultanan Palembang bersifat “istana-sentris”. Sifat yang demikian ini tampaknya berimplikasi pada kesinambungan dan pemeliharaan tradisi keilmuan Islam di wilayah ini.

#### **D. Sosial Budaya**

Kondisi sosial budaya masyarakat Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dapat dikatakan amat baik adanya, karena dapat dilihat dari penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari. Sistem kekerabatan, organisasi sosial, sistem pengetahuan dan teknologi, perkembangan ini didukung oleh letak ibu kota kesultanan yang menghubungkan pedagang dari luar kesultanan. Dengan demikian dapat mempercepat dan memperluas tukar-menukar unsur sosial budaya antar bangsa. Pada masa perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam, kondisi sosial budaya masyarakat Palembang dipengaruhi dan kebudayaan yang besar yaitu Melayu dan Jawa. Budaya Jawa dikenal oleh masyarakat Palembang sejak dibangunnya keraton Jawa yaitu dikenal dengan nama Keraton Kuto Gawang, letak Keraton Kuto Gawang ini berada ditepian sungai Ogan dan sungai Komering yang dilindungi oleh pulau Gabora atau yang disebut sekarang adalah pulau Kemaro sebagai asas atau awal tanah elit Jawa.<sup>43</sup>

Dengan dibangunnya Keraton Kuto Gawang sebagai basis pertama elit Jawa, maka mulai berbaurnya dua kebudayaan yang berbeda yaitu Melayu dan Jawa. Budaya Melayu yang ada pada masyarakat Palembang dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa yang sangat mendominasi. Pengaruh Melayu dan Jawa terhadap

---

<sup>43</sup> Maskur, “Peranan Pangeran Keramo Jayo Selama Menjadi Pejabat Negara Palembang di Bawah Pemerintah Kolonial Belanda (1823-1853)”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010), hal. 29-30.

masyarakat Palembang, dapat kita lihat dari segi bahasa yang digunakan masyarakat keraton. Masyarakat keraton menggunakan dialek Palembang yang diadaptasi dari kosa kata bahasa Jawa. Namun, kosa kata Jawa dengan dialek Palembang yang dipakai oleh masyarakat keraton tidak menjadi bahasa Palembang secara keseluruhan. Perbedaan bahasa ini merupakan hierarki sosial yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari.<sup>44</sup>

Hal tersebut untuk mencari adanya perbedaan sosial penggunaan bahasa Jawa yang dipakai oleh pembesar Palembang terutama ketika menghadap raja. Selain dari segi bahasa yang dipakai oleh masyarakat Palembang, ada juga pembagian kelas dalam masyarakat keraton, ini merupakan ciri khas dari masyarakat keraton Jawa.<sup>45</sup> Selain itu, status sosial di Palembang menjadi dua golongan, yaitu golongan *priyayi* dan *rakyat*. *Priyayi* berarti turunan raja-raja atau kaum ningrat. Kedudukan ini dapat diperoleh karena kelahiran atau atas perkenan dari raja. *Priyayi* tersebut dibagi lagi menjadi tiga golongan, yaitu pangeran, raden, dan mas agus.<sup>46</sup>

Pangeran berarti yang memerintah. Gelar ini harus selalu diberikan oleh raja dan tidak seorangpun mendapatkannya yang tidak mempunyai jabatan. Tetapi kemudian gelar ini diberikan semaunya dan di daerah udik gelar itu tidak begitu dihargai. Anak kandung laki-laki raja sendiri dan anak laki-laki asli dari para pangeran biasanya dikaruniai gelar itu, tetapi gelar ini tidak pernah diwarisinya dan raja dapat menahannya seperti ia dapat memberikannya kepada siapa ia

---

<sup>44</sup> Jeroen Peeters, *Kaum Mudo-Kaum Tuo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, hal. 10.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>46</sup> J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*, terj, hal. 23.

berkenan memberikannya. Radin atau raden berarti tinggi (luhur) atau terpilih. Anak laki-laki dari perkawinan seorang pangeran dengan anak perempuan seorang pangeran dilahirkan sebagai raden dan tidak seorangpun dapat merebut gelar itu darinya.<sup>47</sup>

Mas-agus atau masagus berarti berharga banyak. Gelar ini dimiliki oleh anak laki-laki sah asal dari perkawinan seorang pangeran atau raden dengan seorang perempuan dari golongan rakyat. Demikianlah keadaan di bawah Susuhunan Cindo Welang, tetapi Sultan Limabang menentukan, bahwa anak-anak laki-laki dari seorang pangeran dan raden dari suatu perkawinan dengan seorang perempuan dari golongan rakyat, harus disebut raden. Mereka sekarang yang masih disebut masagus adalah keturunan dari generasi yang ada pada zamannya Sultan Limabang, yaitu kira-kira 60 atau 70 tahun yang lalu.<sup>48</sup>

Gelar-gelar dari istri keluarga-keluarga *priyayi* yaitu istri sultan yang sebenarnya disebut ratu. Istri-istri dan anak-anak perempuan dari pangeran dan raden disebut raden ayu yang artinya cantik, terpilih dan agung. Istri-istri dan anak-anak perempuan dari masagus disebut masayu, artinya si cantik yang sangat berharga. Golongan yang terdahulu dan ketiga golongan ini dianggap termasuk golongan *priyayi*. Mereka tidak mempunyai harta benda yang dapat diwariskan, tetapi banyak dari mereka yang dikaruniai beberapa dusun atau marga oleh raja, yang dengan sekehendaknya dapat dicabut kembali oleh raja.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 24.



Gambar 1.4. Makam Para Sultan Palembang (sebelum 1880)

Sumber: KITLV/Leiden University Library, Ref. 82957.

Golongan yang kedua yaitu rakyat. Ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan kiai-mas, kiai-agus, dan rakyat jelata. *Pertama*, yaitu kiai-mas atau sekarang yang disebut dengan kemas, adalah anak laki-laki dari perkawinan seorang masayu dengan seorang pria dari rakyat jelata. *Kedua*, yaitu kiai-agus atau sekarang yang disebut dengan kiagus, adalah anak laki-laki dari mantri dan keturunan raden yang terendah dengan rakyat jelata. Mereka diwajibkan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan yang ringan dan halus, tetapi tidak untuk mendayung dan mengerjakan pekerjaan kasar.<sup>50</sup>

*Ketiga*, yaitu rakyat jelata. Rakyat jelat terbagi lagi yaitu orang miji, orang senan, dan orang yang menggadaikan diri dan budak. Orang miji yang di ibu kota

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 25-26.

sama kedudukannya dengan di pedalaman *matagawe* dengan pengecualian, bahwa mereka tidak dikenakan pajak atau menghasilkan pajak. Mereka mempunyai beberapa orang yang dapat dipergunakan untuk berperang, dan lainnya yang dapat melakukan pekerjaan tangan atau membuat karya seni, dan mereka dipergunakan oleh raja dan para pangeran atau pun para raden sesuai dengan itu. Tiap pangeran atau raden mengambil beberapa miji. Tetapi jika mereka tidak puas dengan sang pangeran atau si raden itu, mereka dapat minta untuk dipekerjakan di bawah orang lain. Tiap miji mempunyai sejumlah *alingang*, yang membantunya dalam pekerjaan, yang dituntut dari padanya. *Alingang* berarti keluarga, tetapi ada yang bukan keluarga ikut para miji, karena miji itu adalah orang yang membela hak-haknya dan memberi bantuan kepadanya, jika mereka memerlukannya dan untuk itu mereka membantu miji dalam kewajiban-kewajiban yang dituntut dari padanya.<sup>51</sup>

Orang senan yaitu suatu golongan yang lebih rendah dari miji, tetapi yang tidak boleh dipekerjakan oleh siapa pun kecuali hanya pada raja. Mereka dipergunakan untuk membuat dan memperbaiki perahu, rumah, dan mendayung untuk raja. Mereka juga mempunyai *alingang*-nya, tetapi tidak menghasilkan pajak-pajak lain. Golongan terakhit yaitu orang yang menggadaikan diri untuk membayar hutangnya dan budak, adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan raja, tetapi dipergunakan oleh mereka, yang meminjamkan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 26.

uang kepada mereka atau telah membelinya. Mereka merupakan golongan yang paling celaka dan itulah pembagian golongan rakyat.<sup>52</sup>

## **E. Ekonomi**

Mata pencaharian penduduk Palembang adalah bertani, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan tambang serta berdagang. Pada saat itu sistem pertanian masih sederhana, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dari hasil pertanian mereka dijual. Untuk mengolah lahan pertaniannya, mereka menggunakan *pawang* atau kapak, beliung atau kapak ringan.<sup>53</sup> Pertanian berkembang baik di berbagai wilayah Palembang berkat kondisi tanahnya yang subur. Van Sevenhoven melaporkan apa yang disaksikannya ketika berada di Kesultanan Palembang Darussalam bahwa tanah-tanah di sekitar ibukota kesultanan dan pedalaman menghasilkan banyak buah dan sayur-mayur dengan kualitas yang sangat baik. Tanaman-tanaman sayur dan buah ini tumbuh begitu subur, bahkan menurut Van Sevenhoven, pertumbuhannya jauh lebih sempurna dibandingkan dengan tanaman-tanaman serupa yang tumbuh di Jawa. Bukan itu saja, buah-buahan dan sayur-mayur yang dihasilkan di Palembang, lebih empuk dan mengandung lebih banyak airn lebih manis dan lebih enak. Hal ini menjadi salah satu pokok alasan baginya untuk menyatakan bahwa

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 27.

<sup>53</sup> Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 26.

Palembang akan menjadi salah satu tempat yang paling menyenangkan bagi orang-orang Eropa untuk tinggal dan menetap di Hindia Belanda.<sup>54</sup>

Bukan hanya di wilayah sekitar Palembang, pedalaman Palembang juga dikatakan sebagai wilayah yang menghasilkan produk-produk yang penting bagi Belanda untuk menyuplai pasar di Eropa. William Marsden, seorang pegawai Inggris yang pernah bertugas di Bengkulu, melaporkan bahwa daerah pedalaman atau yang juga biasa disebut dataran tinggi Palembang merupakan kawasan yang sangat produktif. Pada lahan-lahan dataran tinggi ini terdapat banyak kebun-kebun lada yang diusahakan oleh penduduk.<sup>55</sup> Komoditas yang berupa hasil pertanian Palembang adalah lada. Kewajiban menjual lada kepada VOC sesuai dengan kontrak, menyebabkan Sultan-Sultan Palembang mewajibkan rakyatnya menanam lada di daerah *uluan*, Bangka dan Belitung (terbesar di daerah Rawas). Sementara itu, hasil alam dari Palembang adalah timah. Selain hasil pertanian lada, masih banyak produk pertanian lainnya yang dihasilkan oleh Palembang, seperti kapas (ditanam di lokasi bekas tanaman padi yang telah dipanen), gambir, nila, tembakau (tembakau Ranauw/Ranau sangat laku baik di Palembang maupun di luar Palembang karena disukai oleh konsumen sehingga memiliki nilai jual yang tinggi), sirih, buah pinang, rami, dan pisang. Buah-buahan yang terkenal adalah mangga, durian, cempedak, jeruk nipis, nanas, jambu bol, jambu biji, pepaya, srikaya, buah nona, langsung, prambeh, duku, rambutan, delima, dan bidara.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*, hal. 73.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>56</sup> Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik 1804-1825*, hal. 27.

Sebagai komoditas yang sangat penting pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, timah dijadikan bahan dasar untuk berbagai barang kebutuhan hidup sehari-hari, antara lain kaca, cangkir teh, tempa lilin, bejana altar leluhur, kertas dupa (Tiongkok memproduksi kertas timah terbesar dan mengekspornya ke kawasan Asia Tenggara), pematri kapal-kapal bocor, pelapis peti kayu (*canisters*) kemasan untuk dibawa ke Eropa. Timah juga digunakan sebagai bahan campuran kuningan dan timbel (*plumbum*). Timah juga menjadi komoditas eksklusif karena menjadi bahan membuat senjata dan uang logam. Di Kesultanan Palembang Darussalam dan Banten, produk olahan dari timah dijadikan alat tukar (koin) yang disebut *picis/pitis*. Begitu banyak yang dapat dibuat dengan menggunakan bahan dasar timah, sehingga sangat wajar apabila timah menjadi komoditas yang sangat dicari oleh bangsa-bangsa di dunia pada saat itu.<sup>57</sup>

**Tabel 1.1. Realisasi Penjualan Timah Kesultanan Palembang kepada VOC, Tahun 1750-1790**

PERIODE	VOLUME (PIKUL)
1750-1760	15.000
1760-1770	22.000
1770-1780	18.000
1780-1790	15.000

Sumber : Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, (Jakarta: Haji Mas Agung ), hal.112.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 28.

Wilayah Palembang terdiri atas kawasan dataran tinggi dan rendah. Daerah Kesultanan Palembang Darussalam banyak dialiri oleh sungai-sungai besar dan kecil, rawa-rawa dan laut/selat. Sungai-sungai besar yang terdapat di wilayah Palembang dikenal dengan nama Batanghari Sembilan. Kondisi demikian menyebabkan Kesultanan Palembang sangat kaya akan hasil perikanannya. Jenis-jenis ikan yang dihasilkan di wilayah Palembang antara lain tupa, lemak, lais, tembakang, patin, bandeng, kluyu, pareh, dalum, belida, sagaret, arok, toman, tongkol, delak, buju, lele, juara, blutulang, tebakang, dan lain-lain. Ikan-ikan yang menjadi primadona adalah lemak, lais, patin, jangutan, delek, dan kali. Oleh karena itu, salah satu sumber mata pencaharian utama penduduk di wilayah itu adalah menangkap ikan. Sebagai contoh penduduk Sungsang menggantungkan hidup mereka dari menangkap ikan. Ikan dan udang kering, terasi, dijual ke Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.<sup>58</sup>

**Tabel 1.2. Harga ikan di Palembang pada tahun 1822**

JENIS IKAN	JUMLAH	HARGA
Gurami besar	1 ekor	f. 1,00
Bager besar	1 ekor	f. 2,00
Belida besar	7 ekor	f. 2,12
Gabus besar	1 ekor	f. 0,07
Udang besar	30 ekor	f. 0,07

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 29.

Lais	6 ekor	f. 0,07
------	--------	---------

Sumber : J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*, terj. Soegarda Poerbakawatja, (Djakarta: Bhratara, 1971). hal. 63-64

Dari berbagai produk yang dihasilkan wilayah Palembang, sebagian dimanfaatkan untuk ekspor, antara lain rotan, getah, damar, damar wangi, kayu laka, lilin, gading gajah, tanduk kerbau, emas pasir, kopi, gula aren, gambir, pinang, kayu manis, nila, lada, tembakau, rami, tebu, getah naga, sarang burung, katun mentah, katun murni, kemenyan, tikar rotan, karet, beras, emas, kain, baju, berbagai kerajinan tangan, tembaga olahan, kuningan, dan tembikar. Produk tambang selain timah adalah emas (banyak terdapat di Rawas, Pasemah), sulfur, besi.<sup>59</sup>



Gambar 1.5. Sungai di Palembang (sekitar tahun 1900)  
Sumber : KITLV/Leiden University Library, Ref. 104046

Komoditas di atas dibawa oleh penduduk dari *uluan* ke ibu kota dengan perahu dan rakit. Semua produk yang telah terkumpul di ibu kota Palembang,

<sup>59</sup> Ibid., hal. 29.

dijual kepada pedagang perantara yaitu pedagang Tionghoa dan Arab. Kedua kelompok etnis tersebut memperdagangkannya kembali kepada para pedagang asing, dan di daerah lainnya di Nusantara. Barang-barang tersebut diperjualbelikan atau ditukar dengan berbagai produk impor, antara lain garam, kain linen, wol, sutera, tembaga, gula, minyak kelapa, kacang, candu, kertas, genting, keramik Cina, alat-alat rumah tangga yang terbuat dari besi, benang emas, obat-obatan, teh, bahan makanan, dan minuman. Selanjutnya, berbagai produk Palembang diekspor ke berbagai wilayah seperti Tiongkok, Siam, Jawa, pantai timur Sumatera, Lingga, dan pulau-pulau lain di Nusantara. Satu-satunya barang impor dari Eropa yang sangat diminati di Asia Tenggara selama berabad-abad adalah senapan.<sup>60</sup>

Banyaknya jenis produk komersial yang dihasilkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam membuat kesultanan itu menjadi rebutan antara bangsa-bangsa Eropa, khususnya Belanda dan Inggris. Berdasarkan kontrak-kontrak yang dibuat oleh Belanda sejak abad ke-17 dan Inggris abad ke-19 dengan Kesultanan Palembang membuktikan bahwa kerajaan ini sangat penting di mata bangsa-bangsa Eropa. Kesultanan Palembang juga terkenal sebagai penghasil berbagai kerajinan, seperti ukir gading, ukir kayu, pandai besi, tembaga, emas, tenun, sulam, dan kaligrafi. Mereka mengolah emas menjadi sarung emas dengan tembaga, sehingga menjadi logam yang indah yang disebut swasa. Dari campuran ini dibuat berbagai barang kebutuhan rumah tangga.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 29-30.

Hasil-hasil kerajinan ini diekspor ke Siam. Nilai jual ekspor itu mencapai 500-1000 dolar Spanyol atau setara dengan f 3.500-f 7.000 per tahun. Tembaga hitam adalah campuran tembaga murni dengan emas. Dari campuran ini dihasilkan perhiasan yang sangat berkualitas. Penduduk Kesultanan Palembang telah mengenal teknik perekatan yang baik, sehingga mampu mengolah tembaga, dan timah menjadi kuningan, yang nantinya diolah kembali untuk dijadikan bahan dasar pembuatan *lila* (meriam kecil), kotak sirih, nampan, ketel teh, dan berbagai jenis peralatan rumah tangga. Mereka juga ahli mengolah perak, permata, dan gading. Keahlian lainnya adalah melukis, bertukang, pengrajin sepatu, dan pembuat perahu. Berdasarkan laporan De Kock kepada Gubernur Jenderal pada 1821 (seusai penaklukan Palembang), orang Palembang ahli membuat amunisi, meriam, pengecor kuningan dan pembuat senapan. Pengecor kuningan, dan pembuat senapan umumnya orang Tionghoa.<sup>62</sup>

Para perempuan umumnya membuat bahan pakaiannya sendiri dengan membuat sarung, penutup kepala, dan pakaian dengan menggunakan katun yang berasal dari Eropa yang dihiasi dengan berbagai motif bunga. Produk mereka sangat menonjol karena berkualitas tinggi. Para pengrajin Palembang sangat terkenal dengan keahlian menenun baju dan kopiah Arab dengan benang emas, pelet (prada), dan bordir, seperti jenis *trawangan* dan katun putih sulam kait yang indah. Bahkan benang yang indah yang terdapat di Padang dan bagian Sumatera

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 30.

lainnya berasal dari Palembang. Pada daerah *uluang* juga terdapat kerajinan katun tetapi bahan dan cara pembuatannya masih kasar.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 30.